

BAB II

NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SUNNI SERTA IMPLIKASINYA HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH

A. Nikah Mut'ah

1. Defenisi Nikah Mut'ah

Nikah secara bahasa (etimologi) berarti berkumpul, senggama, dan akad. Secara umum jumbuh ulama dengan garis besar lebih condong untuk mengartikan nikah dengan defenisi yang mengarah pada suatu akad untuk mengahhlalkan persetubuhan.¹ *Mut'ah* berasal dari *mata'a*, *yamta'u*, *mat'an wa mut'atan* yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Secara umum nikah *mut'ah* bisa diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan dengan akad dan jangka waktu tertentu. Ada pula ulama fikih yang mendefinisikannya dengan “akad seorang laki-laki kepada wanita tertentu, seperti sehari, seminggu, atau sebulan”²

Defenisi lain yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i³ dan Maliki, yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu. Menurut ulama madzhab Syafi'i, madzhab

¹Kathur Suhardi, *Kawin Campur Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kaustar, 14

²Dalam Kitab *At-Ta'rif* yang terdapat dalam CD Matabah asy-Syamilah, nikah *mut'ah* didefenisikan sebagai ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menikah dalam jangka waktu tertentu.

³Lihat dalam karya terbesar Syafi'i kitab *Al-Umm* dalam CD Maktabatul Fiqhi Wa Ushuluhu Juz V, 52

pada dasarnya tetap menjadi pegangan jumbuh sahabat. Akan tetapi, ada sebagian kecil di antara mereka yang masih membenarkan, bahkan melakukan praktek nikah *mut'ah*, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah.

Di dalam beberapa riwayat yang sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, jelas sekali gambaran nikah *mut'ah* yang dulu pernah dilakukan para sahabat radhiyallahu 'anhum. Gambaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Dilakukan pada saat mengadakan safar (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. (HR. Muslim hadits no. 1404)
- b) Tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. (HR. Bukhari no. 5116 dan Muslim no. 1404)
- c) Jangka waktu nikah *mut'ah* hanya 3 hari saja. (HR. Bukhari no. 5119 dan Muslim no. 1405)
- d) Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. (HR. Muslim no. 1406)

Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Al-Khattab (581-644) secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman

hukum rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah *mut'ah*. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan al-Ma'mun (Khalifah ke-7 Abbasiyah, 813-833 M), nikah *mut'ah* secara formal dibolehkan kembali. Akan tetapi nikah *mut'ah* ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu'tashim (833-842 M). Berbeda dengan aliran *Sunni*, aliran *Syi'ah* yang sejak semula membolehkan nikah seperti ini tetap mempertahankannya sampai sekarang, dan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut.

3. Hukum Nikah Mut'ah

Ulama sepakat bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk perkawinan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit dan keadaan ekonominya terbatas, sedangkan tenaganya dikonsentrasikan untuk menghadapi musuh Islam. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga sebagaimana dikehendaki dari sebuah perkawinan.

Kebanyakan dari para shahabat dan semua ulama' fiqih mengharamkan nikah *mut'ah* berdasarkan hadist Rasulullah yang mutawatir tentang pengharaman nikah tersebut. Yang menjadi ikhtilaf dikalangan mereka adalah waktu pengharaman nikah *mut'ah*. Dari sebagian riwayat yang mengharamkannya pada perang khaibar, ada yang sebagian pada penaklukan

Makah, ada yang sebagian pada waktu perang Tabuk, ada yang sebagian pada haji wada', ada yang sebagian pada umrah qadha' dan ada sebagian pada waktu tahun Authas.

Ulama fikih kemudian berselisih pendapat dalam dua hal pokok. Pertama, apakah nikah *mut'ah* itu diperbolehkan untuk seterusnya atau ada larangan yang berlaku untuk selamanya. Kedua, ulama yang memandang nikah *mut'ah* itu dilarang untuk selamanya berbeda pendapat tentang kapan larangan itu disampaikan Rasulullah Saw. Mengenai persoalan pertama, menurut ulama madzhab empat serta jumhur sahabat dan tabi'in, yang dirujuk oleh kaum *Sunni* nikah *mut'ah* untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan itu:

- a) Larangan Rasulullah Saw dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd⁷ larangan tersebut diketahui secara *mutawatir*⁸. Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah *sahih*. Diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, “wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah *mut'ah*. Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti.”

⁷Lihat dalam *fiqh muqarrin* Ibnu Rusyd, Tanpa tahun, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtasid*, Tanpa tempat Penerbit: Dar al-Ma'rifat, Juz II, 259

⁸Artinya berita larangan Rasulullah terhadap nikah *mut'ah* diketahui secara luas oleh banyak orang dan diterima dari banyak orang pula, sehingga mustahil di antara mereka terjadi kesepakatan untuk berdusta.

Adapun mengenai persoalan kedua, ulama berbeda pendapat karena terdapat beberapa hadis yang berbeda satu sama lain. Menurut hadis riwayat Ali Bin Abi Thalib, nikah *mut'ah* itu diharamkan pada saat perang Khaibar (628 M), bersamaan dengan diharamkannya memakan daging himar. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari ar-Rabi bin Saburah, larangan itu terjadi pada saat haji wadak Nabi Saw. Adapun menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ilyas bin Salamah dari ayahnya, Rasulullah Saw melarang pada sahabat pada hari ketiga setelah perang Autas. Imam Nawawi (ahli hadis) menegaskan kronologi terjadinya perubahan dari dibolehkan sampai dilarangnya nikah *mut'ah* oleh Rasulullah Saw. Pertama, nikah *mut'ah* dibolehkan sebanyak dua kali, yaitu sebelum perang Khaibar dan ketika *futuh* (penaklukan) Mekah atau perang Autas sampai hari ketiga. Kedua, larangannya juga dua kali, yaitu pada masa perang Khaibar dan setelah *futuh* Mekah. Setelah itu, menurutnya lebih lanjut, Nabi Saw mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.

kebolehan nikah *mut'ah* karena umat Islam pada saat itu juga dalam keadaan transmisi. Banyak sekali yang imannya belum kuat, peralihan dari jahiliyah ke Islam, maka *mut'ah* merupakan kebijaksanaan terbaik untuk mengantisipasi hal yang demikian. Hal ini seperti diharamkan minuman keras bagi umat Islam.¹¹

Lebih lanjut dalam pandangan Sunni kebolehan *mut'ah* itu langsung diikuti dengan pelarangan atau penghapusan. Nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan dan dilarang dibolehkan lagi dan dilarang lagi untuk selamanya. Imam syafi'i berkata "tidak pernahku ketahui sesuatu yang dibolehkan dan dilarang lagi kecuali tentang nikah *mut'ah*."¹²

Hadits- hadits shahih banyak menjelaskan tentang keharaman nikah *mut'ah* yang diawali pada perang khaibar, kemudian dibolehkan dan diharamkan lagi pada *fath* al- Makkah. Adapun waktu pembolehan sangat singkat yaitu antara pembukaan al- Makkah sampai perang Hunain.

Imam Nawawi dalam syarah shahih Muslim menjelaskan bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* maupun pembolehan terjadi dua kali. Ia dihalalkan sebelum khaibar kemudian diharamkan pada *fath* al- Makkah kemudian dibolehkan lagi dan terakhir diharamkan untuk selamanya.¹³

¹¹Muhammad al-hamid, *Pandangan Ahlus Sunnah Tentang Nikah Mut'ah*, (surabaya: YPI, 1980), 3

¹²*Ibid*, 3

¹³Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Juz I*, Dar al-Ihyah Wal Anbiya', 44

diantaranya adalah karena nikah *mut'ah* semata-mata sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu syahwat, sehingga tidak jauh berbeda dengan zina.

Disamping itu, nikah *mut'ah* menurut kalangan Sunni, telah menempatkan perempuan pada titik bahaya, karena ibarat sebuah benda yang bisa pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan jenis ini juga dinilai merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang sempurna sebuah keluarga dan jaminan kesejahteraan serta pendidikan yang baik.

B. Hak Waris Anak

Setelah melewati pembahasan nikah *mut'ah* menurut pandangan Sunni di atas, maka dapat di nilai bahwa hukum nikah *Mut'ah* dalam fiqh Sunni adalah nikah tersebut dengan tegas menfatwakan ia haram hukumnya. Walaupun dilihat dari aspek historis dalam ajaran awal islam pernah dihalalkan atau diperbolehkan nikah tersebut. Tetapi pada akhirnya pada zaman pemerintahan Umar ibnu Khattab, pernikahan tersebut di haramkan untuk selamanya. Jadi dengan ini, implikasi hak wari anak tidak berlaku sama sekali. Bermula dari pengharaman mutlak dari nikah tersebut maka tidak ada jalan untuk melakukan akad dalam pernikahan *mut'ah*.